

Received: April 2021	Accepted: May 2021	Published: June 2021
----------------------	--------------------	----------------------

## **EFISIENSI ILUSI FISKAL DAN PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi Kasus : Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 s.d. 2018)**

Edy Yusuf Agung Gunanto<sup>1\*</sup>, Farah Aisha Nur Afifah<sup>2</sup>  
Universitas Diponegoro<sup>1,2</sup>  
Jl. H. Prof. Soedarto, SH.- Tembalang Semarang 50275  
\*Email : edyyusuffebundip@gmail.com,

### **ABSTRACT**

*The research is to prove that there was a fiscal illusion in district government spending in East Java in 2016-2018, and to prove that the fiscal illusion that occurred in government spending had an influence on the economic growth of each district. In fiscal decentralization in the era of regional autonomy, there is a phenomenon that each regional government still depends on financing activities from government transfer funds rather than receiving local revenue to finance regional expenditures. Even though government spending has increased every year, it is not in balance with economic growth. In this study it can be proven that there is a fiscal illusion in district government spending in East Java 2016-2018, this fiscal illusion affects the economic growth of each region. To increase economic growth and reduce regional unemployment rates, it is necessary to make efforts to increase capacity and fiscal independence as well as increase the labor force participation rate.*

*Keywords: fiscal illusion, government spending, local government, economic growth, East Java.*

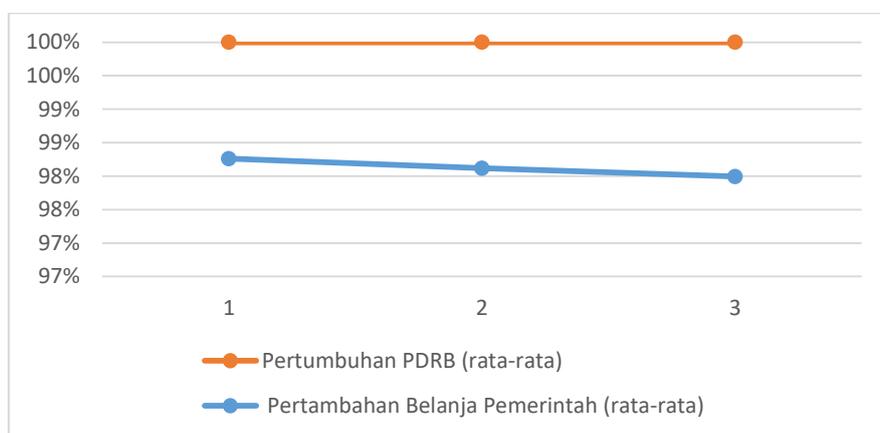
### **PENDAHULUAN**

Salah satu tujuan dibentuknya Pemerintah negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Republik Indonesia 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, yakni meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi dalam masyarakat Indonesia. Kemakmuran ekonomi akan meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan dalam perekonomian sehingga akan terjadi penambahan jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan pada kurun waktu tertentu disebut sebagai pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 1999).

Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus meningkat menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik. Pengukuran pertumbuhan ekonomi tingkat nasional digunakan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan harga konstan, karena pengaruh harga atau inflasi telah dihilangkan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dalam sistem

pemerintah daerah biasanya di indikasi dengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kenaikan atau penurunan PDRB menggambarkan terjadi kenaikan atau penurunan dalam proses produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah tertentu. Terjadinya kenaikan PDRB menunjukkan kegairahan ekonomi bergerak dan berekspansi sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi didaerah tersebut (Rahma, Soelistyo dan Hadi, 2016).

Menurut Priyo Hari Adi (2009), pertumbuhan ekonomi secara signifikan sangat ditentukan oleh pengeluaran pembangunan daerah oleh pemerintah daerah. Gambar 1.1.. menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) tahun 2016 sampai dengan 2018 tidak sebanding dengan tingkat pertumbuhan pengeluaran pemerintah kabupaten di Jawa Timur.



Gambar 1.

Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan PDRB  
Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2016-2018

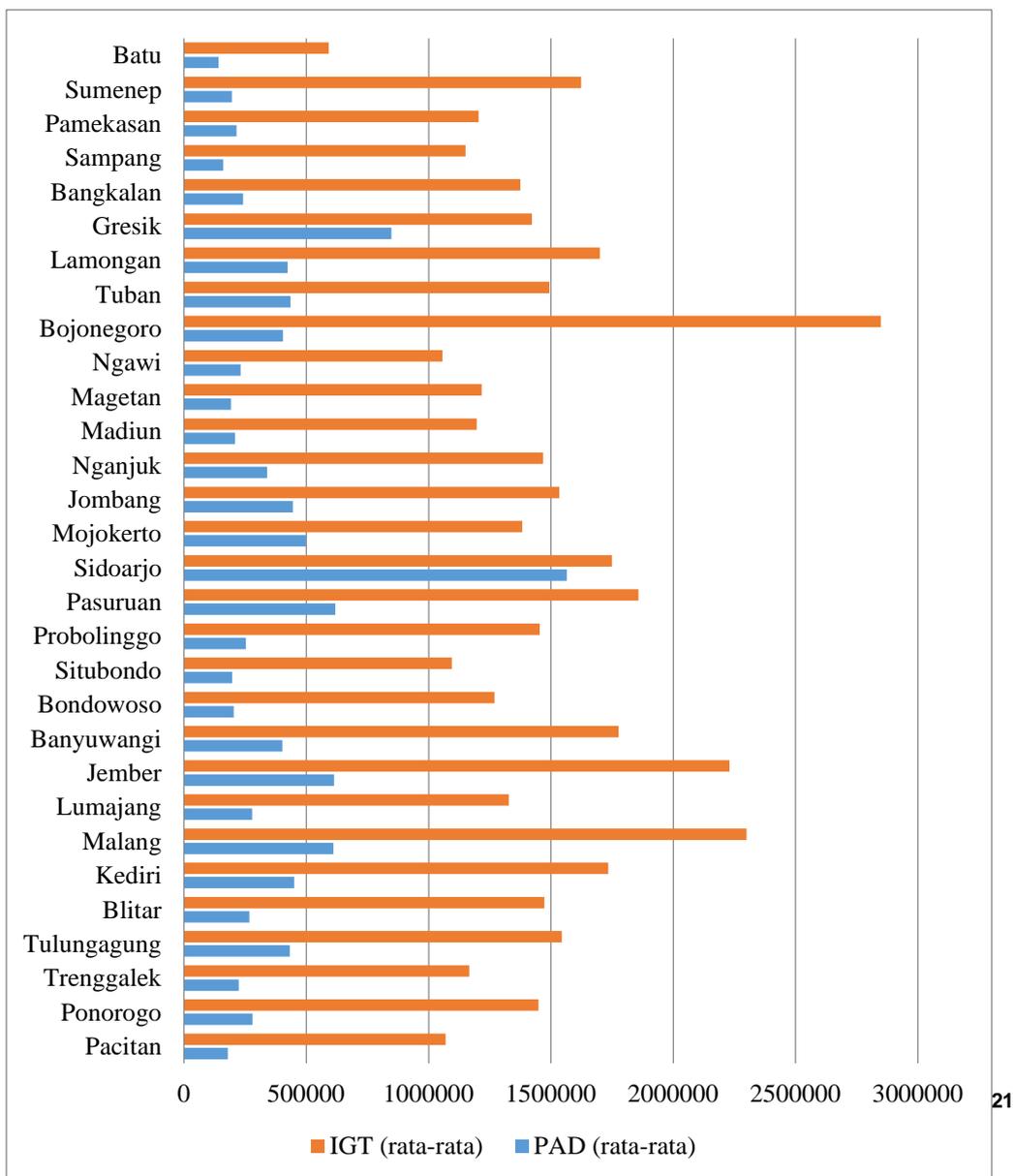
Sumber : BPS Jawa Timur , 2019

Pada sistem keuangan daerah, tingkat otonomi dan kemandirian fiskal tidak sama pada level pemerintahan daerah yang berbeda. Penelitian oleh Guziejewska (2016) pada pemerintahan daerah di Polandia menunjukkan ilusi fiskal merupakan konsekuensi dari keuangan publik. Sistem keuangan pemerintahan daerah desentralistik dimana pembiayaan anggaran pengeluaran publik lebih bergantung pada penerimaan dari transfer pemerintah (*inter-governmental transfer*) dibandingkan penerimaan dari kemandirian fiskal dan otonomi fiskal pemerintah daerah, akan mendorong pembentukan dan penguatan terjadinya ilusi fiskal. Penelitian yang telah

dilakukan oleh Rusydi (2010) menunjukkan bahwa telah terjadi ilusi fiskal di seluruh pemerintah provinsi di Indonesia setelah berlakunya otonomi daerah.

Ilusi fiskal merupakan bentuk dari perilaku asimetris pada keuangan pemerintah daerah. Deteksi ilusi fiskal dilakukan dengan cara melihat kontribusi dari masing-masing komponen penerimaan terhadap peningkatan anggaran. Terjadinya ilusi fiskal, menyebabkan komponen pengeluaran dimanipulasi dan diasumsikan sama (*ceteris paribus*) besarnya dengan penerimaan daerah. Menurut Oates (1996) penerimaan dari transfer Pemerintah Pusat dapat mendorong peningkatan pendapatan sendiri (PAD) sebab penambahan penerimaan dari transfer menyebabkan pengeluaran publik pemerintah meningkat dan dapat berdampak pada pertumbuhan jumlah pendapatan sendiri. Maka semakin besar penerimaan daerah seharusnya semakin besar pula Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Gambar 2 menunjukkan rata-rata penerimaan transfer pemerintah asimetris terhadap penerimaan PAD pemerintah kabupaten di Jawa Timur tahun 2016-2018.



### Gambar 1.

#### Perbandingan Transfer dan PAD Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2016-2018

Sumber: BPS Jawa Timur, 2019

Hal ini merupakan indikasi terjadinya ilusi fiskal karena peningkatan penerimaan daerah yang tinggi (dari penambahan penerimaan transfer) untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah yang juga semakin tinggi ternyata tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang signifikan dengan meningkatnya PAD. Ilusi fiskal pada keuangan pemerintah ditunjukkan dengan adanya selisih jumlah pengeluaran pemerintah yang tidak dapat dibiayai oleh PAD agar memperoleh bantuan dari pemerintah pusat berupa penerimaan transfer dari pemerintah. Pada kondisi seperti ini, pemerintah daerah akan cenderung memaksimalkan belanja/pengeluaran daerah dibandingkan memaksimalkan penerimaan PAD (Ndadari dan Adi, 2008).

#### **METODE**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang disimpan dan didapat dari pihak lain dan biasanya berupa data masa lalu / historical. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah seluruh kabupaten di Jawa Timur.

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data anggaran pengeluaran pemerintah (Ga), data realisasi anggaran pengeluaran pemerintah (Gr) yang terdiri dari data belanja tidak langsung (BTL) dan belanja langsung (BL), serta anggaran pendapatan asli daerah (PADa), realisasi pendapatan asli daerah (PADr) terdiri dari penerimaan pajak daerah (TAXr) dan penerimaan retribusi daerah (RDr), data anggaran penerimaan transfer dari pemerintah lain/ *intergovernmental transfer* (IGTa) yang terdiri dari anggaran penerimaan dana alokasi umum (DAUa), anggaran dana bagi hasil (DBHa), dan anggaran dana bantuan desa (DBDa), realisasi penerimaan transfer dari pemerintah (IGTr) yang terdiri dari realisasi penerimaan dana alokasi umum (DAUr), realisasi dana bagi hasil (DBHr), dan realisasi dana bantuan desa (DBDr), data jumlah penduduk (N), dan data pertumbuhan ekonomi (Y).

Data keuangan yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), data keuangan pemerintah daerah pada Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI. Sedangkan data-data mengenai jumlah penduduk, angka pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi diperoleh dari Badan Pusat Statisti (BPS) serta Simreg BAPPENAS. Alat analisis menggunakan Ilusi Fiskal dengan Manipulasi Pengeluaran

(*Expenditure Manipulation*). Pengukuran manipulasi belanja (*Expenditure Manipulation*) menurut Dollery (1995) dinyatakan dengan formulasi sebagai berikut :

$$PADA_t = (1/DAUa_t)(PADA_t + IGTa_t) + (DAUr_t/DAUa_t) + (1/DAUa_t) + DBDr + v$$

dimana :

PADa = Anggaran pendapatan asli daerah (PAD);

DAUa = Anggaran dana alokasi umum (DAU);

DAUr = Realisasi dana alokasi umum (DAU);

IGTa = Anggaran penerimaan transfer (IGT);

DBD = Dana Bantuan Desa;

$(1/DAUa)(PADA + IGTa)$  = Rasio pendapatan nasional ditransfer pemerintah ke pemerintah daerah;

$DAUr/DAUa$  = Persepsi relatif pemerintah terhadap pemerintah daerah;

$1/DAUa$  = Kepentingan relatif dari DAU terhadap pengeluaran pemerintah daerah.

Variabel bebas pertama  $(1/Pg')Y$ , dalam model Dollery-Worthington mewakili bagian dari pendapatan negara yang dipakai langsung sebagai pengeluaran pusat dibawah persepsi harga pada pengeluaran pemerintah pusat ( $Pg'$ ) (Dollery dan Worthington, 2005). Belanja langsung pemerintah daerah menggunakan anggaran dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah daerah dalam bentuk DAUa, sedangkan pendapatan nasional diproksi dengan total anggaran penerimaan pemerintah daerah dari PADa dan dana transfer lain yang diterima (IGTa) (Adi, 2005).

Ilusi Fiskal sebagai Determinan Negatif Pertumbuhan Ekonomi, untuk membuktikan hipotesis mengenai ilusi fiskal pada pemerintah kabupaten di Jawa Timur memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing, maka dilakukan analisis regresi dengan persamaan berikut :

$$Y_i = \alpha_1 + \beta_1 TAX_r + \beta_2 RD_r + \beta_3 DAU_r + \beta_4 DBH_r + \beta_5 BTL_r + \beta_6 BL_r + \beta_7 f + \beta_8 DBD_r + \mu$$

dimana :

Y = Pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten;

TAXr = Penerimaan pajak daerah (realisasi);

RDr = Penerimaan retribusi daerah (realisasi);

DAUr = Dana Alokasi Umum yang diterima (realisasi);

DBHr = Dana Bagi Hasil yang diterima (realisasi);

BLTr = Belanja Tidak Langsung (realisasi);

BLr = Bantuan Langsung (realisasi);

f = tingkat ilusi fiskal yang terdeteksi;

DBDr = Dana Bantuan Desa yang diterima (realisasi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deteksi Ilusi Fiskal dengan Manipulasi Belanja (*Expenditure Manipulation*)

Model persamaan regresi yang digunakan dalam melakukan deteksi ilusi fiskal pada pengeluaran pemerintah kabupaten di Jawa Timur tahun 2016-2018 memenuhi asumsi klasik dalam hal normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Alat analisis yang digunakan berbasis pada model persamaan Priyo dan Puspa (2009) menggunakan variabel dependen pendapatan asli daerah (PAD), sedangkan variabel-variabel independennya adalah komponen penerimaan transfer pemerintah kepada kabupaten dalam bentuk rasio pendapatan nasional yang ditransfer Pemerintah ( $1/DAU)(PAD+IGT)$ , tingkat perspektif relatif Pemerintah ( $DAU'/DAU$ ), kepentingan relatif DAU dari pemerintah terhadap pengeluaran masing-masing pemerintah kabupaten ( $1/DAU$ ), dan dana bantuan desa (DBD).

Tabel 1. Deteksi Ilusi Fiskal di Jawa Timur

Variabel	Coefficient	Prob.	Keterangan	Kesimpulan
$(1/DAU)(PAD+IGT)$	0,916	0,000	Signifikan	Tidak terjadi ilusi fiskal
$(DAU'/DAU)$	-0,896	0,000	Signifikan	<b>Terjadi ilusi fiskal</b>
$(1/DAU)$	0,029	0,426	signifikan	Tidak terjadi ilusi fiskal
DBD	0,119	0,004	Signifikan	Tidak terjadi lusi fiskal
C	0,899	0,036	Variabel Dependen (Ga)	

Sumber : data diolah, 2019

Deteksi ilusi fiskal dengan manipulasi pengeluaran (*expenditure manipulation*) memiliki asumsi bahwa penambahan besarnya komponen penerimaan seharusnya memiliki hubungan positif dengan belanja (Priyo, 2009). Hal ini dikarenakan belanja daerah merupakan variabel terikat yang besarnya akan sangat bergantung pada

sumber-sumber pembiayaan daerah, baik yang berasal dari penerimaan daerah itu sendiri maupun yang berasal dari transfer pemerintah pusat.

Hasil penelitian membuktikan adanya ilusi fiskal pada pengeluaran pemerintah kabupaten di Jawa Timur pada Tabel 1.1. dapat dilihat bahwa adanya ilusi fiskal pada pengeluaran pemerintah kabupaten di Jawa Timur tahun 2016-2018 yang ditunjukkan dengan PDRB(Y) dan ilusi devisit memiliki hubungan positif dan signifikan dengan pengeluaran pemerintah. Sedangkan untuk harga relatif barang dan jasa publik (Y/Gr) memiliki hubungan negatif dan signifikan secara statistik.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rusydi (2010) yang membuktikan bahwa terjadinya ilusi fiskal di seluruh pemerintah provinsi di Indonesia setelah diberlakukannya otonomi daerah, karena terdapat variabel pendapatan yang memiliki korelasi negatif dengan pengeluaran pemerintah dengan nilai yang signifikan. Serta penelitian yang dilakukan oleh Adi dan Ekaristi (2009) yang membuktikan adanya fenomena ilusi fiskal dalam kinerja anggaran pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun 2001 sampai dengan 2004.

Adanya ilusi fiskal dalam pelaksanaan anggaran pemerintah daerah, karena ketergantungan transfer daerah yang tinggi kepada pemerintah pusat. Akan menyeimbangkan rasio dan rasio dana belanja daerah PAD belanja daerah menunjukkan bahwa daerah sangat bergantung transfer dana. Penggunaan dana yang ditransfer dalam distribusi tidak efisien belanja daerah untuk belanja infrastruktur membuat daerah kekurangan sumber pendapatan. Selain itu menurut Kuncoro (2007) masyarakat (pemerintah daerah) menerima pembayaran transfer, maka penerimaan pajak daerah akan meningkat, peningkatan konsumsi barang publik. Ini menunjukkan transfer meningkatkan konsumsi barang publik, tapi bukan pengganti pajak daerah.

### **Ilusi Fiskal sebagai Determinan Negatif Pertumbuhan Ekonomi**

Model persamaan regresi yang digunakan untuk membuktikan bahwa ilusi fiskal pada pengeluaran pemerintah kabupaten di Jawa Timur tahun 2016-2018 merupakan determinan negatif atas pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah telah memenuhi asumsi klasik dalam hal normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Variabel dependen dalam model ini adalah pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh variabel-variabel independen berupa tingkat ilusi fiskal, penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, penerimaan dana transfer DAU, penerimaan dana transfer DBH, penerimaan dana transfer DBD, pengeluaran pemerintah dalam belanja langsung, dan pengeluaran pemerintah dalam belanja tidak langsung.

Hasil estimasi dengan persamaan regresi yang digunakan membuktikan bahwa ilusi fiskal pada pengeluaran pemerintah kabupaten di Jawa Timur tahun 2016-2018 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional masing-masing kabupaten. Ilusi fiskal yang terjadi pada pengeluaran pemerintah kabupaten di Jawa Timur tahun 2016-2018 merupakan determinan negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan hasil estimasi untuk nilai koefisien variabel ilusi fiskal adalah negatif, yang artinya apabila ilusi fiskal pada pengeluaran pemerintah semakin besar maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang akan semakin menurun.

Hasil penelitian pengaruh ilusi fiskal pada pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten di Jawa Timur nilai konstanta pada estimasi model sebesar 2,537 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen dianggap konstan, maka tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 2,537 juta rupiah. Untuk koefisien tingkat ilusi fiskal yang terdeteksi sebesar -1,064 menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan jumlah rasio ilusi fiskal sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 1,064%.

Tabel 1. Pengaruh Ilusi Fiskal pada Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur

Variabel	Coeffisien	Prob.	Keterangan	Kesimpulan
TAXr	-0,001	,089	Tdk signifikan	<b>Berpengaruh Negatif</b>
RDr	-7,371E-5	,884	Tdk signifikan	<b>Berpengaruh Negatif</b>
DAUr	0,000	,020	Signifikan	Berpengaruh Positif
DBHr	-0,001	,124	Tdk signifikan	<b>Berpengaruh Negatif</b>
BTLr	0,609	,000	Signifikan	Berpengaruh Positif
BLr	0,391	,000	Signifikan	Berpengaruh Positif
DBDr	-0,001	,016	Signifikan	<b>Berpengaruh Negatif</b>
f	-1,064	,000	signifikan	<b>Berpengaruh Negatif</b>
C	2,537	,000	Variabel Dependen (Y)	

Sumber : data sekunder yang diolah

Hasil ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah kabupaten di Jawa Timur tahun 2016-2018 belum maksimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya karena terdapat ilusi fiskal. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Paulo Reis Mourao pada tahun 2008 yang membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat ilusi fiskal yang terjadi pada suatu daerah akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien variabel ilusi fiskal (f) adalah negatif dan berpegaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

Nilai ilusi fiskal bagi pemerintah kabupaten dan kota Jawa Timur dihitung menggunakan metode peningkatan anggaran pendapatan sendiri. Model ini dikembangkan oleh Borcharding dan Deacon (1972), model Borcharding dan Deacon digunakan untuk menghitung hubungan antara anggaran belanja pemerintah dengan variabel independen berupa pertumbuhan ekonomi regional, perbandingan pertumbuhan dan realisasi pengeluaran pemerintah, perbandingan pendapatan daerah untuk pembiayaan kegiatan pemerintah, perbandingan komponen pendapatan berupa pajak daerah dan indeks HCT untuk menggantikan berbagai jenis pajak tidak langsung, serta variabel jumlah penduduk.

Dalam hal ini, ilusi fiskal akan muncul sebagai koefisien negatif defisit variabel ilusi dan variabel kompleksitas pajak, sedangkan koefisien positif variabel pajak tidak langsung dan variabel elastisitas pajak. Variabel D biasanya dinyatakan sebagai rasio antara total pendapatan dari total pengeluaran pemerintah pemerintah, V berasal mengurangi pajak yang terlihat pada total pendapatan pemerintah melalui H indeks konsentrasi Herfindahl, L diturunkan dari rasio pajak penghasilan terhadap total pendapatan pemerintah.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil-hasil analisis dan pembahasan terkait dengan penelitian mengenai pengaruh ilusi fiskal pada pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran (kasus: kabupaten di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2018) adalah Ilusi fiskal dapat dibuktikan terjadi pada pengeluaran pemerintah kabupaten di Jawa Timur tahun 2016-2018. Munculnya ilusi fiskal menandakan bahwa pemerintah daerah kabupaten di Jawa Timur belum mengalokasikan pendapatannya secara efisien.

Ilusi fiskal yang terjadi pada pengeluaran pemerintah daerah kabupaten di Jawa Timur tahun 2016-2018 dapat dibuktikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten masing-masing. Hasil ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah kabupaten di Jawa Timur tahun 2016-2018 belum maksimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya karena terdapat ilusi fiskal yakni bahwa semakin tinggi tingkat ilusi fiskal yang terjadi pada suatu daerah akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, dibutuhkan beberapa upaya untuk mengurangi tingkat ilusi fiskal pada pengeluaran pemerintah agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat pengangguran daerah kabupaten di

Jawa Timur, antara lain Pemerintah daerah agar meningkatkan sitem penganggaran dan perencanaan pengelurana pemerintah secara proporsional antara alokasi belanja rutin yang sifatnya konsumtif dengan pengeluaran publik seesuai dengan nilai pungutan yang dibebankan kepada masyarakat.

Pemerintah kabupaten di Jawa Timur agar meningkatkan kemandirian fiskal daerah sehingga tidak tergantung dengan dana transfer dari pemerintah (*inter-governmental transfer*) khususnya dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) melalui optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah dan pemerintah daerah bersama-sama meningkatkan angka partisipasi kerja sehingga tingkat pengangguran terbuka kabupaten berkurang melalui upaya upaya peningkatan kualitas, kompetensi dan kapabilitas tenaga kerja.

## REFERENSI

- Adi, Priyo Hari. 2006. "Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pengeluaran Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota Se Jawa-Bali)". *Paper disampaikan pada "Simposium Nasional Akuntansi IX di Padang"*.
- Adi, Priyo Hari dan Puspa Dewi Ekaristi. 2009. "Fenomena Ilusi Fiskal dalam Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol.6, Nomor 1 : hal. 1-19.
- Dollery, Brian E. Dan Andrew Wrthington. 1995. " Federal Expenditure and Fiscal Illusiion: An Australian Test of The Flypaper Hypothesis". *The Journal of Federalism*. Vol. 25, No. 1 : hal. 23-34.
- Dollery, Bryan E. Dan Andrew Worthington. 1995. " The empirical Analysis of Fiscal Illusion". *Journal of Economic Surveys*. Vol.10, No.3: hal. 261-297.
- Gemmel, Norman, Oliver Morrissey and Abuzer pinar. 1999. " Fiscal Illusion and the Demand for Government Expenditures in The UK". *European Journal of Political Economy*. Vol. 15, hal. 687-704.
- Guziejewska, Beata. 2016. " Theoretical Dimensions of Fiscal Illusion in Local Government Finance:.". *Journal of Economics, Bussiness and Management*. Vol. 4, No.3: hal.215-219.
- Mourao, Paulo Reis. 2007. " Towards a Fiscal Illusion Index". *Paper disampaikan pada INFER Workshop "Integration and Globalization: Challenges for Developed and Developing Countries at Coimbra"*.
- Mourao, Pulo Reis. 2008. " The Consequences of Fiscal Illusion on Economic Growth". *eJournal of Tax Research*. Vol. 6, No.2: hal. 82-89.
- Ndadari, Laras Wulan dan Priyo Hadi Adi. 2008." Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat". *Paper disampaikan pada "The 2nd National Conference UKWMS, 6 Semptember 2008 di Surabaya"*.
- Prawirosetoto, Yuwono. 2002. "Desentralisasi Fiskal di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya*. Vol.2: hal. 132-143.

- Rustiono, Deddy. 2008. "*Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa tengah*". Tesis. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Rusydi, Bahrul Ulum. 2010. "Analisis Determinan Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Daerah dan Deteksi Ilusi Fiskal (Studi Kasus Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2008)". Skripsi: Unpublished. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Safitri, Intan. (2016). "*Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh*". Skripsi: Unpublished. Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Statistik, badan Pusat. 2009. "*Pedoman Praktis Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota, Tata Cara Penghitungan Menurut Penggunaan*". Jakarta: Badan Pusat Statistik.